

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Pada bab pendahuluan sebelumnya telah dirumuskan bahwa ada empat tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pertama, menggambarkan tingkat disparitas ekonomi antar daerah provinsi di Indonesia. Kedua, melakukan analisis sigma konvergensi ekonomi antar daerah di Indonesia. Ketiga, melakukan analisis beta konvergensi absolut menggunakan model (Barro & Sala-i-Martin, 1992). Dan keempat, melakukan analisis beta konvergensi kondisional.

Didasari pada teori neoklasik Solow (1956) dan Swan (1956), model analisis konvergensi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model konvergensi yang dikembangkan oleh Barro & Sala-i-Martin (1991). Dimana, model yang dibangun didasari pada model pertumbuhan neoklasik Solow (1956) dan Swan (1956). Asumsi yang mendasari model pertumbuhan neoklasik adalah bahwa modal sebagai input dalam fungsi produksi mengalami penambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing marginal return of capital*). Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan daerah tertinggal lebih tinggi dari pertumbuhan daerah maju, dan dalam jangka panjang semua daerah akan memiliki tingkat output yang sama atau konvergen pada kondisi yang *steady-state* (Barro & Sala-i-Martin, 1992). Konvergensi ini juga dapat digambarkan dengan penurunan disparitas ekonomi antar daerah atau yang disebut dengan sigma konvergensi. Berbagai penelitian terdahulu memberikan kesimpulan yang beragam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dan data runtut waktu yang terdiri dari 33 daerah provinsi dari tahun 1987-2014. Data runtut waktu digunakan untuk menganalisis sigma konvergensi, sedangkan data panel digunakan untuk menganalisis beta konvergensi absolut dan beta konvergensi kondisional. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur konvergensi disparitas ekonomi antar daerah dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per pekerja termasuk migas dan tanpa migas yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010.

Disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia diukur menggunakan indeks Williamson (1965). Dari hasil perhitungan indeks Williamson, ditemukan bahwa disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu dengan rata-rata 80,22 persen per tahun yang dihitung menggunakan indikator PDRB per pekerja termasuk migas, dan 75,80 persen per tahun yang dihitung menggunakan indikator PDRB per pekerja tanpa migas. Perbedaan yang terjadi antara disparitas ekonomi termasuk migas dan disparitas ekonomi tanpa migas disebabkan oleh karena perbedaan kepemilikan sumber daya alam setiap daerah.

Jika semua daerah provinsi di pulau Jawa tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks Williamson, disparitas ekonomi antar daerah relatif lebih rendah. Hal yang sama juga ditemukan jika DKI Jakarta dikeluarkan dalam perhitungan, rata-rata nilai indeks Williamson diperoleh hanya sebesar 69,45 persen per tahun. Sedangkan jika dipola menurut tingkat pendapatan daerah, disparitas ekonomi antar daerah yang berpendapatan tinggi lebih tinggi dari disparitas ekonomi antar daerah yang berpendapatan rendah.

Hasil analisis sigma konvergensi ekonomi menyimpulkan bahwa secara meyakinkan terjadi penurunan disparitas ekonomi antar daerah provinsi di Indonesia atau sigma konvergensi. Sigma konvergensi ini ditemukan baik pada PDRB per pekerja termasuk migas maupun pada PDRB per pekerja tanpa migas antar daerah provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, penurunan disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia cukup lambat.

Temuan sigma konvergensi ini sejalan dengan temuan pada analisis beta konvergensi ekonomi antar daerah provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi model beta konvergensi absolut ditemukan bahwa koefisien regresi variabel PDRB per pekerja awal bertanda negatif dan signifikan. Artinya bahwa secara meyakinkan terjadi konvergensi ekonomi absolut antar provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, PDRB per pekerja daerah tertinggal tumbuh lebih cepat PDRB per pekerja daerah maju. Temuan konvergensi absolut ini terjadi baik pada model yang menggunakan data PDRB per pekerja termasuk migas maupun pada model yang menggunakan data PDRB per pekerja tanpa migas.

Berdasarkan hasil estimasi waktu konvergensi absolut menggunakan *half-life time*, ditemukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai PDRB per pekerja termasuk migas antar daerah di Indonesia secara absolut adalah 1.146 tahun dengan kecepatan konvergensi 0,605 per seribu kali per tahun. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pemerataan PDRB per pekerja tanpa migas antar daerah di Indonesia secara absolut adalah 2.093 tahun dengan kecepatan konvergensi 0,331 per seribu kali per tahun.

Dengan menambah beberapa variabel kontrol pada model regresi beta konvergensi, maka model konvergensi disebut sebagai beta konvergensi kondisional. Adapun variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel jumlah tenaga kerja, *human capital*, keterbukaan ekonomi, mobilitas penduduk dan kebijakan desentralisasi fiskal. Hasil estimasi model beta konvergensi kondisional menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja, keterbukaan ekonomi, mobilitas penduduk dan kebijakan desentralisasi fiskal signifikan pada model yang menggunakan PDRB per pekerja termasuk migas. Sedangkan variabel yang signifikan pada model yang menggunakan PDRB per pekerja tanpa migas adalah variabel jumlah tenaga kerja, mobilitas penduduk dan kebijakan desentralisasi fiskal.

Hasil estimasi waktu konvergensi kondisional menggunakan *half-life time*, ditemukan bahwa dengan mengontrol beberapa variabel, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konvergen atau pemerataan kondisional PDRB per pekerja termasuk migas antar daerah di Indonesia adalah 242 tahun dengan kecepatan konvergensi 2,869 per seribu kali per tahun. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pemerataan kondisional PDRB per pekerja tanpa migas antar daerah di Indonesia adalah 206 tahun dengan kecepatan konvergensi 3,359 per seribu kali per tahun.

8.2 Implikasi Kebijakan

Dari perhitungan nilai indeks Williamson disimpulkan bahwa disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut,

tentu akan mengancam keutuhan NKRI karena akan memicu kecemburuan daerah tertinggal. Meskipun hasil analisis sigma konvergensi dan beta konvergensi menyimpulkan bahwa disparitas ekonomi antar daerah ini mengalami penurunan atau terjadi konvergensi, dimana penurunan disparitas atau konvergensi ekonomi antar daerah cukup lambat, namun sangat diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang dapat mempercepat konvergensi disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingginya disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia adalah perbedaan kepemilikan sumber daya alam masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong peningkatan *human capital* di daerah-daerah tertinggal, khususnya daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang rendah. Upaya peningkatan *human capital* dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan kerja kepada tenaga kerja yang tidak terdidik, dengan tujuan agar tenaga kerja tidak terdidik di daerah tertinggal mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa harus bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang ada.

Kebijakan ini diperlukan karena umumnya pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, hanya ada di daerah perkotaan yang identik dengan daerah maju. Sedangkan tenaga kerja yang tinggal di daerah tertinggal tidak memiliki akses yang mudah ke daerah

perkotaan, selain karena keterbatasan informasi juga dibatasi oleh kemampuan finansial biaya ke daerah perkotaan.

Sedangkan dalam jangka panjang, peningkatan *human capital* di daerah-daerah tertinggal ini dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa khusus untuk anak-anak yang berasal dari daerah tertinggal. Kebijakan ini diperlukan mengingat beberapa skema beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah dan swasta dewasa ini lebih diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Kenyataannya, kemampuan akademik anak yang berasal dari daerah-daerah tertinggal umumnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan akademik anak yang berasal dari daerah maju. Dengan demikian, jika indikator pemberian beasiswa hanya didasarkan pada kemampuan akademik semata, tentu anak-anak yang berasal dari daerah tertinggal sulit mendapatkan beasiswa yang ditawarkan.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi antar daerah di Indonesia adalah dengan mendorong pergerakan modal ke daerah tertinggal. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui pemberian subsidi bunga kepada lembaga keuangan yang mengucurkan dananya ke daerah-daerah tertinggal. Tujuan kebijakan ini adalah pelaku usaha di daerah tertinggal mampu mengakses pembiayaan jasa keuangan dengan suku bunga yang lebih ringan.

Hasil analisis sebelumnya menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja memperlambat konvergensi ekonomi antar daerah. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah tenaga kerja lebih didominasi oleh beberapa daerah

maju. Dimana, penambahan jumlah tenaga kerja di daerah maju karena luasnya lapangan kerja di daerah maju. Dengan demikian, kebijakan dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperluas lapangan kerja di daerah-daerah tertinggal melalui peningkatan investasi di daerah tertinggal. Tujuannya adalah, dengan bertambahnya lapangan kerja di daerah tertinggal akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan output daerah tertinggal. Sehingga pemerataan ekonomi antar daerah provinsi di Indonesia dapat dipercepat.

Sebaliknya, mobilitas penduduk dapat mempercepat konvergensi ekonomi antar daerah. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah mendorong peningkatan mobilitas penduduk terutama ke daerah-daerah tertinggal melalui peningkatan upah minimum regional. Karena dengan meningkatnya upah minimum regional di daerah-daerah tertinggal akan mendorong mobilitas tenaga kerja ke daerah tersebut, sehingga dapat mendorong peningkatan output di daerah tertinggal. Disparitas upah minimum regional antar daerah yang cukup tinggi akan semakin memperparah disparitas ekonomi antar daerah provinsi karena mobilitas penduduk ke akan meningkat di daerah yang memiliki upah yang tinggi.

Kebijakan desentralisasi fiskal terbukti mampu mempercepat konvergensi ekonomi antar daerah provinsi di Indonesia. Dengan demikian, implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah dengan tetap mempertahankan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah terlaksana sejak tahun 2001. Hal yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan berbagai aturan yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

8.3 Kontribusi Penelitian

Kajian tentang konvergensi disparitas ekonomi antar daerah dalam sebuah Negara atau dalam sebuah kawasan memiliki kontribusi yang berarti dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi regional. Didasari pada model pertumbuhan neoklasik Solow (1956) dan Swan (1956), Barro & Sala-i-Martin (1992) membangun model regresi untuk menguji proses konvergensi ekonomi antar daerah atau antar Negara. Meskipun mendapat kritikan dari Quah (1993), model regresi Barro & Sala-i-Martin (1992) masih menjadi alat yang relevan untuk menguji konvergensi ekonomi antar wilayah.

Berbagai penelitian terdahulu di berbagai Negara telah mewarnai perkembangan model regresi Barro & Sala-i-Martin (1992). Dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita, berbagai hasil penelitian mendukung kesimpulan Quah (1993) bahwa *the beta convergence is the necessary condition but not sufficient condition*. Dengan kata lain bahwa analisis beta konvergensi tidak menjadi penjas yang berarti analisis sigma konvergensi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi pada analisis konvergensi antar daerah, khususnya di Indonesia dalam hal pengukuran konvergensi ekonomi antar daerah menggunakan indikator PDRB per pekerja sesuai dengan model pertumbuhan neoklasik yang mendasari model penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB per pekerja antar daerah di Indonesia mengalami konvergensi, baik diukur berdasarkan hasil analisis sigma konvergensi maupun hasil analisis beta konvergensi. Dengan kata lain, bahwa dengan menggunakan PDRB per pekerja penelitian ini

mengkonfirmasi kembali kesimpulan Sala-i-Martin (1995) bahwa keberadaan beta konvergensi akan cenderung menghasilkan sigma konvergensi sebagai sanggahan kesimpulan Quah (1993) yang mengatakan bahwa beta konvergensi menjadi syarat perlu (*necessary condition*) dalam menjelaskan sigma konvergensi namun tidak menjadi syarat cukup (*sufficient condition*).

Melalui penggunaan 33 daerah provinsi, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam hal penggambaran kondisi disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu yang menguji konvergensi ekonomi antar daerah di Indonesia hanya menggunakan 26 daerah provinsi sebagai objek penelitiannya, sehingga model panel data yang digunakan disebut sebagai *balanced panel data*. Sedangkan dalam penelitian ini memasukkan seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia, dan model penelitiannya disebut sebagai *unbalanced panel data*. Tujuannya adalah agar memberikan penggambaran yang lebih nyata pada analisis konvergensi ekonomi antar daerah di Indonesia.

8.4 Saran

Analisis konvergensi disparitas ekonomi antar daerah akan memberikan hasil yang lebih mendalam jika menggunakan kabupaten/kota sebagai kompirasi hasil penelitian ini. Sehingga, yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak memberikan analisis pada tingkat daerah kabupaten/kota di Indonesia sebagai kompirasi dari hasil temuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji konvergensi ekonomi antar daerah di Indonesia pada tingkat daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Nilai R-square dalam model penelitian ini ditemukan tidak terlalu tinggi, artinya masih banyak variabel kontrol yang dapat dimasukkan dalam model untuk mendorong peningkatan nilai R-square. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa variabel kontrol lainnya dalam model analisis beta konvergensi kondisional.

Referensi

- 
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1991). Convergence across States and Regions. *Brookings Papers on Economic Activity*, 22(1), 107–182. <http://doi.org/10.2307/2534639>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251. <http://doi.org/10.1086/261816>
- Quah, D. T. (1993a). Empirical cross-section Dynamics in Economic Growth. *European Economic Review*, 37(1), 426–434. [http://doi.org/10.1016/0014-2921\(93\)90031-5](http://doi.org/10.1016/0014-2921(93)90031-5)
- Quah, D. T. (1993b). *Empirical Cross-Section Dynamics in Economic Growth*.
- Sala-i-Martin, X. (1995). *The Classical Approach to Convergence Analysis* (No. 117).
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <http://doi.org/10.2307/1884513>
- Swan, T. W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Records*, 32(1), 334–361.
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(1), 1–84.